



## SEJUMLAH PERSIAPAN SUDAH DILAKUKAN Program MBG DIY Mulai 13 Januari

**YOGYA (KR)** - Pemda DIY telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 42 miliar untuk makan bergizi gratis (MBG). Karena dalam program nasional itu pemerintah pusat mengamanatkan agar daerah menyiapkan 2,5 persen dari pendapatan asli daerah (PAD) untuk mendukung program tersebut.

Pemerintah pusat telah resmi memulai program itu secara nasional sejak 6 Januari 2025. Namun untuk DIY, pelaksanaannya direncanakan mulai 13 Januari 2025.

"Ditargetkan program MBG untuk wilayah DIY akan dilaksanakan secara serentak pada Minggu kedua Januari (13 Januari). Persiapan teknis dan logistik terus dilakukan untuk memastikan kelancaran program tersebut. DIY berkomitmen mendukung keberhasilan program MBG dengan memanfaatkan

sumber daya lokal, seperti koperasi ikan dan telur, untuk memenuhi kebutuhan logistik," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono di Yogyakarta, Sabtu (11/1).

Beny mengungkapkan, Pemda DIY melalui Bappeda DIY dan Disdikpora DIY telah melakukan berbagai persiapan dan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional serta Satuan Kerja (Satker) SPPG (Satuan Pemenuhan Penyelenggaraan Gizi). Begitu pula untuk anggaran sudah disiapkan melalui AP-



KR-Riyana Ekawati

### **Beny Suharsono**

BD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Semua itu dilakukan karena Pemda DIY berkomitmen penuh dalam mendukung keberhasilan program MBG. Mengingat program MBG bertujuan untuk memberikan asupan gizi yang baik kepada siswa guna meningkatkan kesehatan dan mendukung proses belajar mereka.

"Memang dalam program ini pusat akan ber-

tanggung jawab langsung atas implementasi program. Sedangkan pemerintah daerah berperan sebagai pendukung pelaksana. Meski begitu kami berharap program ini dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat besar bagi siswa," ungkapnya.

Beny menambahkan, kesuksesan program MBG akan bisa terwujud apabila ada dukungan dari semua pihak. Walaupun begitu pihaknya mengingatkan agar tidak terjadi pergeseran fungsi dalam pelaksanaan program. Untuk itu sebaiknya guru tidak boleh menjadi petugas program karena itu dapat menggeser fungsi utama mereka. Oleh karenanya tugas dan struktur pelaksana sejak awal harus jelas. **(Ria)-f**